

RINGKASAN

**HAYATUN FITRIA
NIM 210510317**

**Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum Terhadap
Pembangunan Waduk Krueng Keureuto Di
Kabupaten Aceh Utara
(Nuribadah, S.H, M.H. dan Tri Widya
Kurniasari, S.H, M.Hum.)**

Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, seharusnya pengadaan tanah dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak, melalui proses yang menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan musyawarah. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksepakatan nilai ganti rugi, minimnya sosialisasi, dan penolakan warga untuk melepaskan tanah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyelesaiannya sengketa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian bersifat deskriptif dan berfokus pada pihak-pihak terkait di Gampong Blang Pante. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data yang terstruktur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Krueng Keureuto dilakukan secara litigasi, yakni melalui jalur pengadilan, sebagaimana terlihat dari dikabulkannya sebagian gugatan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk, akibat ketidakpuasan masyarakat atas nilai ganti rugi, ketidakterlibatan dalam musyawarah, serta konflik kepemilikan lahan antar desa, yang menandakan bahwa proses nonlitigasi seperti musyawarah sebelumnya belum berhasil menyelesaikan sengketa secara tuntas. Kendala penyelesaian sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum terhadap pembangunan Waduk Krueng Keureuto adalah ketidaksesuaian data administratif dengan kenyataan di lapangan, ketidaksepakatan tentang nilai ganti rugi yang dianggap tidak sesuai, kurangnya sosialisasi dan musyawarah yang melibatkan masyarakat, serta sengketa batas wilayah antar desa. Upaya dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melibatkan pihak independen dalam penilaian ganti rugi melalui KJPP, menerbitkan dokumen kepemilikan lahan seperti Surat Keterangan Tanah (SKT), melaksanakan mediasi non-litigasi untuk mencapai kesepakatan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Saran yang diberikan adalah diperlukan koordinasi lebih baik antara pemerintah dan masyarakat serta prosedur yang lebih transparan untuk memastikan keadilan dalam pengadaan tanah.

Kata Kunci : Sengketa, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum.

SUMMARY

HAYATUN FITRIA
NIM 210510317

Land Acquisition Dispute Resolution for Public Interest in the Construction of Krueng Keureuto Dam in North Aceh Regency
(Nuribadah, S.H, M.H. and Tri Eidya Kurniasari, S.H, M.Hum.)

Settlement of land acquisition disputes for the construction of the Krueng Keureuto Reservoir in North Aceh Regency, which is part of the National Strategic Project. Based on Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Public Interest, land acquisition should be carried out by providing fair and equitable compensation to the entitled parties, through a process that upholds the principles of justice, transparency, and deliberation. However, in reality the implementation of this project faces various obstacles, such as disagreements over the compensation value, minimal socialization, and residents' refusal to release their land. This study aims to determine how dispute resolution is carried out and to identify obstacles and efforts to resolve the dispute.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach. It is descriptive in nature and focuses on stakeholders in Gampong Blang Pante. Data were collected through interviews, observations, and documentation, followed by structured data analysis.

The results of this study indicate that the settlement of land acquisition disputes for the construction of the Krueng Keureuto Dam was carried out through litigation, namely through the court system, as evidenced by the partial granting of the lawsuit by the Lhoksukon District Court in case No. 14/Pdt.G/2020/PN.Lsk. This was due to public dissatisfaction with the compensation amount, lack of community involvement in deliberations, and inter-village land ownership conflicts, indicating that non-litigation processes such as prior deliberations had not successfully resolved the dispute. The obstacles in resolving land acquisition disputes for the public interest in the construction of the Krueng Keureuto Dam include discrepancies between administrative data and the actual conditions in the field, disagreements over compensation values deemed inappropriate, lack of outreach and community-involved deliberations, and territorial boundary disputes between villages. Efforts to overcome these obstacles include involving independent parties in compensation assessments through Public Appraisal Services Offices (KJPP), issuing land ownership documents such as Land Certificates (SKT), and conducting non-litigation mediation to reach mutual agreements between the community and the government.

The recommendation given is to improve coordination between the government and the community, along with more transparent procedures, to ensure justice in the land acquisition process.

Keywords: *Disputes, Land Acquisition, Public Interest.*